

## DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, R. D. (2020). Optimalisasi pelaporan saldo kas di bendahara pengeluaran oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara Jakarta II dengan pendekatan soft system. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.8038>
- DJKN. (2020). *Sejarah panjang laporan keuangan pemerintah Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13257/Sejarah-Panjang-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Indonesia.html>
- DJPb. (2018). *Panduan teknis bendahara pengeluaran* (Issue 61). [https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/panduan\\_teknis/bendahara/Panduan-Teknis\\_Bendahara-Pengeluaran\\_Final.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/panduan_teknis/bendahara/Panduan-Teknis_Bendahara-Pengeluaran_Final.pdf)
- Hakim, A. (2017). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus - Google Play Buku*. <https://play.google.com/books/reader?id=UVRtDwAAQBAJ&pg=GBS.PA45&hl=id>
- IHPS II. (2016). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2016*. 584.
- Irwin, R., & Nahartyo, E. (2020). *Strategi implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran transaksi belanja negara: Kasus pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK*. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Kepdirjen Perbendaharaan No. 542/PB/2018. (2018). *Perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal perbendaharaan nomor kep-494/PB/2017 tentang pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan*.
- Maulid, L. C., & Sudibyoy, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: Permasalahan dan solusi. *Akuntabel*, 17(2), 301–313.
- Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *ABIS (Accounting & Business Information Systems)*, 8(2), 1689–1699. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58898>
- Nurman. (2017). *Strategi pembangunan daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Perdirjen No.17/PB/2017. (2017). *Peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor 17/PB/2017 tentang uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan*.
- Permenkes No 64/2015. (2015). Peraturan Pemerintah mentero kesehatan 64 tahun 2015. *Peraturan Pemerintah Mentero Kesehatan 64 Tahun 2015*, 1508, 340. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2015/bn1508-2015.pdf>

- Permenpan No.39/2012. (2012). *Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja.*
- PMK 113/PMK.02/2012. (2012). *Peraturan menteri keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.*
- PMK 113/PMK.02/2021. (2021). *Peraturan menteri keuangan nomor 113/PMK.02/2021 tentang tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.*
- PMK 178/PMK.05/2018. (2018). *Peraturan menteri keuangan nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.*
- PMK 190/PMK.05/2012. (2012). *Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2020 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 32.*
- PMK 196/PMK.05/2018. (2018). *Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor: 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.*
- PMK 97/PMK.05/2021. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah.*
- PP No.45/2013. (2013). *Peraturan pemerintah nomor 45 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- PP No.50/2018. (2018). *Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99183/pp-no-50-tahun-2018>
- Rahman, A., & Sukamulja, S. (2012). *Analisis penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara: Kasus pembayaran biaya perjalanan dinas pada direktorat jenderal perbendaharaan.* [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/52081](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/52081)
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis persepsi bendahara pengeluaran atas aspek kepentingan dan kinerja pengguna dan mitra perbankan dalam penerapan kartu kredit pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.33105/JMP.V2I1.372>
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Suleman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). *Manajemen kas pemerintah: Implementasi kartu kredit pemerintah dalam pembayaran belanja negara.* 5(September), 159–169. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>

- UU No.1/2004. (2004). Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, 1–61.
- UU No.15/2004. (2004). *Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*. 1–25.
- UU No.17/2003. (2003). *Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara* (Issue 1).
- UUD. (1945). *Undang undang dasar 1945*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meminimalisir moral hazard pengelola keuangan negara melalui implementasi kartu kredit pemerintah. *Otonomi*, 20, 267–274.
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(1983), 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>